

DETERMINAN PERTUMBUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA BARAT

Indri Agustina¹

indriagustina2323@gmail.com

Nurul Fatimah¹

nurul.fatimah@ekuitas.ac.id

¹*STIE Ekuitas, Bandung*

ABSTRACT

Researchers want to examine the factors that influence the increase in motor vehicle taxes in West Java Province. The research was conducted at the West Java Provincial Revenue Agency (BAPENDA) for the 2016-2018 period. The research method uses descriptive and verification methods with a quantitative approach. The analytical method used is multiple linear regression analysis with panel data using the STATA application. The sample used is 34 district/city branches which are service branches of BAPENDA. The results of the study indicate that the growth in vehicle volume and the tax exemption program have an effect on vehicle tax revenues, while modern tax administration has no effect on vehicle tax revenues.

Keywords: *Growth in Vehicles Volume, Exemption from Tax Sanctions, Modern Tax Administration, Vehicle Tax*

PENDAHULUAN

Iuran kepada Negara yang mengikuti UU disebut dengan pajak. Sifatnya memaksa dengan tanpa ada timbal balik (kontraprestasi) (Mardiasmo, 2011;3). Pajak adalah salah satu peran penting dalam kas masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana yang mengalir dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dan kesejahteraan rakyat (Oyok, 2012;2).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara membutuhkan sumber dana yang cukup besar, untuk menyokong kelangsungan pemerintahan dan masyarakat. Salah satu sumbernya dari perpajakan yang ditentukan oleh negara. UUD 1945 pasal 23 A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara yang diatur oleh Undang-undang” merupakan aturan yang sah mengenai perpajakan Indonesia.

Jumlah kendaraan motor di Jawa Barat tumbuh dengan pesat. Data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat memperlihatkan adanya peningkatan dari tahun ketahunnya. Berikut adalah data jumlah kendaraan bermotor dan penerimaan PKB di daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016 s.d tahun 2018:

Tabel 1.1 Penerimaan PKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018

No.	Tahun	Sum of KBM	Sum of PKB
1.	2016	10.245.500	6.185.206.788.250
2.	2017	10.303.207	6.534.046.619.292
3.	2018	11.164.486	7.540.770.278.845
	TOTAL	31.713.193	20.260.023.686.387

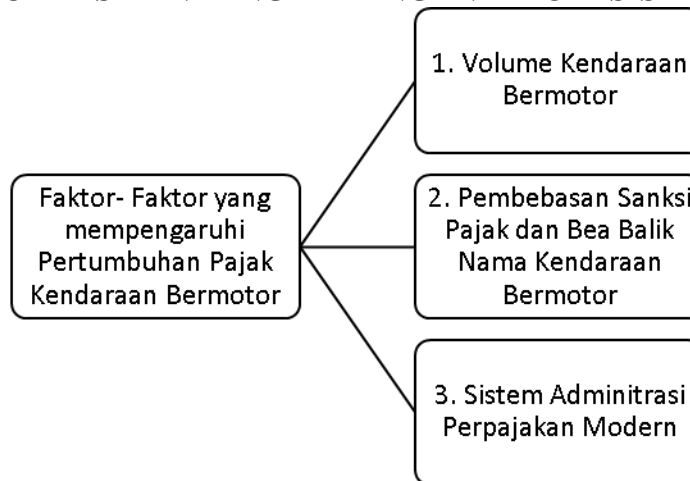
Sumber data: BAPENDA Provinsi Jawa Barat.

Terlihat peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, dari tahun 2016 berjumlah 10.245.500 menjadi 11.164.486 pada tahun 2018. Mengalami peningkatan sebesar

918.986 unit selama 3 (tiga) tahun, dapat dirata-ratakan pertahun mengalami peningkatan sebesar 7.749 unit setiap tahunnya. Dan peningkatan dari jumlah PKB tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 6.185.206.788.250 menjadi sebesar Rp. 7.540.770.278.845 pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.355.563.490.595 mengalami peningkatan selama 3 tahun rata-rata sebesar Rp. 451.854.496.865.

Besarnya peningkatan PKB di Jawa Barat tidak terlepas dari faktor-faktor volume kendaraan bermotor yang meningkat, program pembebasan denda dan pengaktifan Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU), serta administrasi perpajakan modern kendaraan bermotor yang memberikan peningkatan.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS



Gambar 2.1 Model Hubungan Antar Variabel

Pengaruh Pertumbuhan Volume Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan PKB

Hasil penelitian Yuskar, Febri Yanti adalah jumlah kendaraan dan populasi mempengaruhi penerimaan PKB, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi terhadap penerimaan PKB di Sumbar. Oleh karenanya, Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) memonitor jumlah kendaraan dan penduduk untuk menetapkan kebijakan tentang PKB. Selain meningkatkan penerimaan PKB, DPKD dapat meningkatkan layanan dalam proses pembayaran PKB dan mensosialisasikan kewajiban membayar pajak.

Pengaruh Program Pembebasan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan PKB

Hasil Penelitian Lia Fitri Muslim yaitu kebijakan pemberian keringanan pokok PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya yang berasal dari luar daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda secara implementatif kurang optimal.

Pengaruh Administrasi Perpajakan Modern Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan PKB

Hasil penelitian Umi Narimawati, bahwa secara parsial Sistem Administrasi Perpajakan Modern dalam pemberian efek terhadap penerimaan PPh 21 dan jumlah wajib pajak cukup efektif untuk memberikan efek pada penerimaan pajak penghasilan PPh 21 dan secara bersamaan sistem administrasi perpajakan modern dan efektifitas wajib pajak yang sangat besar memberikan efek tentang pendapatan PPh 21.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran, peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : Volume Kendaraan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan PKB.
 H₂ : Pembebasan Sanksi Pajak dan BBNKB berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan PKB.
 H₃ : Sistem Administrasi perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan PKB.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan program komputer Stata. Metode analisis menggunakan model regresi linier data panel dengan analisis regresi berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Rata-rata Data Pertumbuhan Volume Kendaraan, Pembebasan Denda PKB, Perpajakan Administrasi Modern dan PKB

Rata-rata pertumbuhan volume kendaraan bermotor pada 34 cabang P3D di Provinsi Jawa Barat, 34 populasi cabang P3D dijadikan 34 sampel mempunyai rata-rata setiap tahun yang fluktuatif. Dari 34 cabang P3D rata-rata pertumbuhan volume kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 sebesar 40.356, tahun 2017 sebesar 38.273 dan tahun 2018 sebesar 40.842 kendaraan bermotor yang masuk.

Rata-rata wajib pajak yang menggunakan program pembebasan sanksi PKB pada 34 cabang P3D, yang dijadikan 34 sampel cabang P3D mempunyai rata-rata setiap tahunnya yang fluktuatif. Dari 34 cabang P3D rata-rata tahun 2016 sebesar 23.063, tahun 2017 tidak ada dikarenakan pada tahun 2017 ini tidak ada program pembebasan sanksi pajak dan tahun 2018 sebesar 38.063 wajib pajak yang memanfaatkan program pembebasan sanksi pajak.

Rata-rata wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB pada administrasi perpajakan modern (E-Samsat) pada 34 cabang P3D, yang dijadikan 34 sampel cabang P3D mempunyai rata-rata setiap tahunnya fluktuatif. Dari 34 cabang P3D rata-rata tahun 2016 sebesar 317 wajib pajak, tahun 2017 sebesar 707 wajib pajak dan tahun 2018 sangat meningkat yaitu sebesar 6200 wajib pajak yang membayar PKB melalui E-Samsat. Rata-rata penerimaan PKB di Provinsi Jawa Barat pada 34 cabang P3D, yang dijadikan 34 sampel cabang P3D mempunyai rata-rata setiap tahunnya fluktuatif. Rata-rata tahun 2016 sebesar Rp. 181.917.846.713, tahun 2017 sebesar Rp. 192.177.841.744 dan tahun 2018 sebesar Rp. 221.787.361.143 terlihat dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan penerimaan PKB di Provinsi Jawa Barat.

2. Pengaruh Pertumbuhan Volume Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan PKB

Uji secara parsial diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 5% maka hipotesisnya diterima, yang menandakan program pembebasan sanksi PKB berpengaruh terhadap penerimaan PKB. Nilai koefisien yang menunjukkan angka positif dapat diartikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan volume kendaraan bermotor maka semakin tinggi penerimaan PKB.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuskar, Febri Yanti yang menyatakan bahwa pertumbuhan volume kendaraan berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB.

3. Pengaruh Program Pembebasan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan PKB

Uji secara parsial diperoleh nilai sig = 0.000. terlihat nilai sig. lebih kecil dari 5% sehingga hipotesis diterima, yang berarti program pembebasan sanksi PKB berpengaruh terhadap penerimaan PKB. Nilai koefisien yang menunjukkan angka positif dapat diartikan bahwa semakin tinggi yang memanfaatkan program pembebasan sanksi PKB maka semakin tinggi penerimaan PKB.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Lia Fitri Muslim yang menyatakan bahwa program pembebasan sanksi PKB berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB.

4. Pengaruh Administrasi Perpajakan Modern terhadap Penerimaan PKB

Uji secara parsial diperoleh bahwa hipotesis tidak diterima, yang berarti administrasi perpajakan modern tidak signifikan terhadap penerimaan PKB. Nilai koefisien yang menunjukkan angka positif lebih besar dari 0,05 dapat diartikan bahwa semakin tinggi penggunaan administrasi perpajakan modern maka tidak ada pengaruh terhadap penerimaan PKB.

Penelitian sebelumnya oleh Uni Narimawati mendukung hasil penelitian ini. Ia berkata bahwa administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB.

5. Pengaruh Pertumbuhan Volume Kendaraan Bermotor, Program Pembebasan Sanksi Pajak, dan Administrasi Perpajakan Modern terhadap Penerimaan PKB

Pertumbuhan volume kendaraan bermotor, program pembebasan sanksi pajak, dan administrasi perpajakan modern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB. Penelitian ini memperlihatkan bahwa perbandingan pertumbuhan volume kendaraan bermotor, program pembebasan sanksi pajak, dan administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan PKB dengan tingkat signifikansi dimana probabilitas nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi artinya H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan volume kendaraan bermotor, program pembebasan sanksi pajak, dan administrasi perpajakan modern secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PKB.

KESIMPULAN

1. Pertumbuhan volume kendaraan bermotor berpengaruh positive dan signifikan terhadap penerimaan PKB.
2. Program pembebasan sanksi pajak berpengaruh positive dan signifikan terhadap penerimaan PKB.
3. Administrasi perpajakan modern berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penerimaan PKB.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. 2012. Perpajakan Pusat & Daerah. Bandung : Humaniora.
- Agus, Widarjono. 2007. Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi II. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Dede, I. 2015. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nagan Raya. Aceh Barat; Universitas Teuku Umar.
- Dian, Purnamasari. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Bengkulu. Jurnal Akuntansi vol.4, No.1, Februari 2016.
- Diana, Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung. PT.Refika Aditama.
- Frida, 2009. Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. Surakarta; Universitas Sebelas Maret.
- Insukindro, dkk. 2003. Ekonometrika Dasar. FE UGM.
- Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 53 tahun 2001 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru . Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

- Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2000 tentang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2011 Pasal 7 tentang Tarif Pajak.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 tahun 2011 dalam pasal 8 tentang Besaran Pokok Pajak.
- Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Edisi 1. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. Perpajakan Di Indonesia. Pertama. Jakarta: PT. Rahagrafindo Persada.
- Siahaan, Marios Pahala. 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Aisyah Tri Rahayu. 2007. Modul Laboratorium Ekonometrika. FE UNS.
- Sofyan, Assauri. 2005. Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Statistik untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A tentang Hal Keuangan.
- Undang-Undang pasal 6 ayat 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- <https://bapenda.jabarprov.go.id/>
- <http://nusakini.com>
- <http://pajaktaxes.blogspot.com/2007/04/sistem-administrasiperpajakanmodern.html>
- <http://rmoljabar.com>
- <http://www.rmoljabar.com>